KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Menhub batal diperiksa KPK minta penjadwalan ulang
Tanggal : Sabtu, 15 Juli 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Menhub Batal Diperiksa KPK Minta Penjadwalan Ulang

Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri menjelaskan pihaknya bakal menjadwalkan ulang pemeriksaan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Namun, waktunya belum bisa dipastikan.

Candra Yuri Nuralam
redaksi@mediaindonesia.com

KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemanggilan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Ia siap diperiksa terkait dengan dugaan suap pembangunan jalur kereta api, tetapi berhalangan hadir karena tengah bertugas ke luar kota.

"Saat ini Menhub tengah mendapat tugas untuk meninjau proyek transportasi di luar kota. Permintaan keterangan kami mohonkan untuk dapat dijadwalkan kembali," kata juru bicara Kemenhub Adita Irawati melalui keterangan tertulis, kemarin.

Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri membenarkan pihaknya menerima surat pemberitahuan dari Kementerian Perhubungan. Menhub, kata Ali, telah mengonfirmasi tidak bisa hadir kepada penyidik karena sedang berdinas di luar Jakarta.

"Menhub betul ya, jadi berkirim surat, ada konfirmasi kepada tim penyidik KPK tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain. Waktu (pejadwalan ulang) nya pasti nanti kami akan informasikan kepada masyarakat," ucap Ali Fikri di Gedung ACLC, Jakarta, kemarin.

Ali menegaskan Budi akan dikonfirmasi sebagai saksi untuk tersangka Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya. Menurut dia, penyidik lembaga antirasuah hendak mendalami keterangan Budi selaku orang nomor satu di Kemenhub.

Lembaga antirasuah memang sedang menangani kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan terkait dengan pembangunan jalur kereta api di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa-Sumatra tahun anggaran 2018-2022.

Tunggu saja

"Pertanyaannya apa saja yang akan nanti didalami? Tentu tunggu dulu karena ketika belum hadir tentu bisa belum bisa kami sampaikan apa yang akan menjadi materi pertanyaan ataupun pendalaman oleh tim penyidik KPK," ujarnya.

Sebelumnya, penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dengan dugaan korupsi di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Kereta Api pada 11 April lalu.

KPK lantas menetapkan 10 tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatra, dan Sulawesi. Perkara tersebut bahkan sudah ada yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah.

Penyidik pun terus mengembangkan perkara tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi. Kali ini yang hendak didalami ialah terkait dengan pengaturan lelang untuk memenangkan PT Istana Putra Agung (IPA) dalam proyek pembangunan jalur ganda Kereta Api Solo Kadipiro-Semarang.

Ketiga saksi sudah diperiksa, yakni wiraswasta Logam Sehat Utama serta dua ASN, Eko Budi Santoso dan Heni Purwaningtyas. KPK menduga ada petinggi di Kemenhub yang diguyur duit untuk memenangi lelang.

"Jika kemungkinan nantinya memang ada pihak yang turut bisa dipertanggungjawabkan dengan basis alat bukti yang cukup pasti juga kemudian kami kembangkan lebih lanjut," tegas Ali. (A-3)